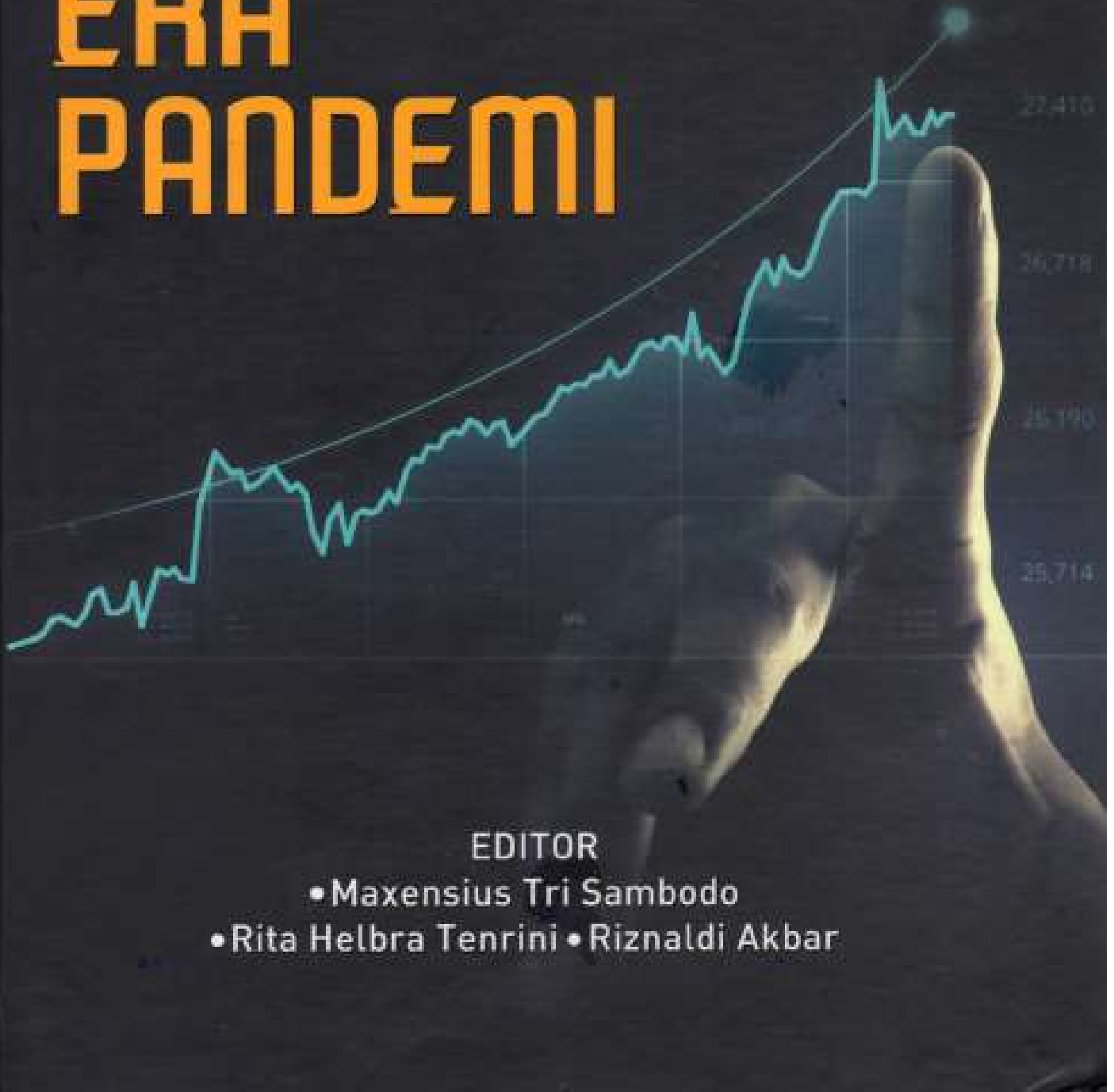


MEMBANGUN KETANGGUHAN EKONOMI ERA PANDEMI



EDITOR

- Maxensius Tri Sambodo
- Rita Helbra Tenrini • Riznaldi Akbar

**MEMBANGUN
KETANGGUHAN
EKONOMI
PADA ERA PANDEMI**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

- (1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MEMBANGUN KETANGGUHAN EKONOMI PADA ERA PANDEMI

EDITOR:

**Maxensius Tri Sambodo,
Rita Helbra Tenrini, dan Riznaldi Akbar**



Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta



KOMPAS GRAMEDIA

MEMBANGUN KETANGGUHAN EKONOMI PADA ERA PANDEMI

Editor:

Maxensius Tri Sambodo, Rita Helbra Tenrini, dan Riznaldi Akbar

GM 621203023

© 2021, Badan Kebijakan Fiskal

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama

Gedung Gramedia Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29–33, Jakarta 10270
Anggota IKAPI, Jakarta, 2021

Tata letak: Fajarianto
Desain sampul: Isran Febrianto

www.gpu.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN: 978-602-06-5658-8
ISBN Digital: 978-602-06-5659-5

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	xi
Bab 1 Prolog Membangun Ketangguhan Ekonomi pada Era Pandemi	1
BAGIAN I STABILITAS EKONOMI MAKRO	17
Bab 2 Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Sudah Optimalkah? <i>Chairul Adi</i>	19
Bab 3 <i>Post Covid-19 Crisis: Optimizing the Limited Fiscal Space to Expedite Economic Recovery</i> <i>Irman Faiz dan Pryan Putro Surya Amin Muchtar</i>	46
Bab 4 <i>Incentives and Economic Growth in Indonesia: Policy Reference to Covid-19 Recovery</i> <i>Agung Endika Satyadini</i>	76
Bab 5 <i>Modern Monetary Theory: Kajian Strategis Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca-Covid-19 di Indonesia</i> <i>Muh Rudi Nugroho, Fitrotul Fadilla, dan Wawan Sugiyarto</i>	107
Bab 6 <i>Economy Recovery through Safeguard Measures Instrument</i> <i>Achmad Ferry Kusuma Wardana</i>	133

Bab 7	Kode HS, Kode HS, Kode HS: Kunci Menuju Strategi Peningkatan Daya Saing Ekspor Indonesia yang Sesungguhnya <i>Surjadi Basuki</i>	159
BAGIAN II KONTEKS EKONOMI REGIONAL		187
Bab 8	Paket Kebijakan Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta <i>Azwar Anas</i>	189
Bab 9	Analisis Klaster Spasial Potensi dan Daya Saing Usaha Industri Mikro Kecil dalam Masa Pandemi Covid-19 <i>Dede Yoga Paramartha</i>	242
Bab 10	Model Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terdampak Covid-19 Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Deli Serdang <i>Hotden Leonardo Nainggolan dan Toga M.H. Siahaan</i>	269
Bab 11	Gulo Asem (Gerai Usaha Mikro Lokal Asli Semarang): Adopsi Program Pemasaran Digital Usaha Mikro Pasca-Covid-19 di Kota Semarang <i>Febrianur I.F.S. Putra, Risanda A. Budiantoro, dan Tito A. Perdana</i>	310
Bab 12	Digitalisasi <i>Special Mission Vehicle</i> Kementerian Keuangan dalam Pemulihan Ekonomi Pasca-Covid-19 <i>Aldi Dwiyanto Yurioputra</i>	340
BAIAN III KESEJAHTERAAN SOSIAL		377
Bab 13	<i>The Covid-19 Pandemic and Indonesia's Fiscal Stimulus for Informal Sector</i> <i>Salim Fauzanul Ihsani and Rahmawan Hadiyanto</i>	379

Bab 14	Stimulus Ekonomi di Masa Pandemi: Harapan dan Realita	
	<i>Nugraha Pukuh, Muhammad Arief Rosyid, dan Hayu Fadlun Widayasthika</i>	404
Bab 15	Menilai Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga terhadap Bencana: Sebuah Pelajaran Memitigasi Dampak Covid-19	
	<i>Herman Palani, Ega Kurnia Yazid, dan Ahmad Zufar Robbani</i>	441
Bab 16	Perempuan dalam Pandemi Covid-19: Dampak, Peran, dan Kebijakan Responsif Gender untuk Pemulihan Ekonomi	
	<i>Aktiva Primananda Hadiarta</i>	478
Bab 17	<i>The Construction of Economics Resilience, Agility and Religiosity of Community to Cope with Burnout during the Covid-19 Pandemic</i>	
	<i>Dinik Fitri R.P., Mun Yah Zahiroh and Syayyidah M.J</i>	527
Bab 18	Dampak Dana Desa dan Ketidakpercayaan Warga pada Aparat Desa terhadap Partisipasi Sukarela dalam Aksi Bersama (Gotong Royong)	
	<i>Udin Suchaini dan I Dewa Gede Karma Wisana</i>	578
	BAGIAN IV PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA	625
Bab 19	Kondisi Pariwisata Bali di Tengah Wabah Covid-19: Realitas dan Respons Kebijakan	
	<i>Ni Nyoman Reni Suasih dan Putu Yudy Wijaya</i>	627
Bab 20	Prediksi Keuangan Perusahaan Sektor Hotel, Restoran, Pariwisata pada masa Pandemi Covid- 19: Pendekatan Metode <i>Altman Z-Score</i>	
	<i>Irene Sukma Lestari Barus</i>	662

- Bab 21 Analisis SWOT: Strategi *Branding* Pariwisata Melalui *Virtual Tourism* di Indonesia Pascapandemi Covid-19**
Helen Dian Fridayani, Herdin Arie Saputra, dan Anang Setiawan 688
- Bab 22 Peran Perubahan Tujuan Wisata Luar Negeri Menjadi Domestik dalam Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19 di Indonesia**
Wisnu Winardi 715
- Bab 23 Optimalisasi Ziswaf dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca-Covid-19**
Ning Karnawijaya dan Siti Rokhaniyah 740
- Bab 24 Pandemi Covid-19 dan Integrasi Zakat dalam Sistem Fiskal Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan**
Ana Toni Roby Candra Yudha dan Imam Wahyudi Indrawan 774
- Bab 25 Menggagas *Social Microfinance* Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi UMKM Pascapandemi Covid-19**
Rifaldi Majid 806
- Bab 26 *Determinants of Behavioral Intentions to Use Islamic Crowdfunding Platform Model as an Alternative Source of Investment for Crowd Funders in Times of Covid-19 Pandemic in Indonesia***
Sulaeman 844

BAGIAN V KEMUDAHAN BERUSAHA	873
Bab 27 <i>How Does Regulatory Environment Affect Business Entry in ASEAN? Implication in Indonesia</i> <i>Silvi Asna Prestiana Wati and Axellina Muara S.</i>	875
Bab 28 Analisis Relevansi Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi di Indonesia Pasca-Covid-19 <i>Muhamad Rosyid Jazuli dan Muhammad Fajar Anandi</i>	901
Bab 29 Tantangan dan Peluang Adopsi serta Adaptasi Bursa Efek untuk UMKM di Indonesia <i>Muhammad Alfian Darmawan, Lailatul Munawaroh, dan Putri Yunela Sari</i>	942
Bab 30 Epilog Berdamai dengan Covid dalam Membangun Ketangguhan Ekonomi	971
TENTANG PARA PENULIS	973

Bab 19

KONDISI PARIWISATA BAII DI TENGAH WABAH COVID-19: REALITAS DAN RESPONS KEBIJAKAN

Ni Nyoman Reni Suasih⁸⁹ dan
Putu Yudy Wijaya⁹⁰

1. PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) mulai merambah Indonesia awal Maret 2020. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika mengumumkan pasien positif Covid-19 untuk kasus 01 dan 02. Setelah pengumuman tersebut, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia semakin bertambah. Sehingga pemerintah mulai memberlakukan pembatasan pergerakan manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ke-daruratan Kesehatan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah sesungguhnya menyadari bahwa dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat maka akan berdampak pada kondisi ekonomi, di sisi lain pemerintah juga tidak dapat mengesam-

⁸⁹Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Denpasar

⁹⁰Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar

pingkan risiko kesehatan masyarakat. Seperti kita ketahui, virus Corona dapat menyebar dengan mudah dan masif apabila masyarakat tidak melaksanakan protokol kesehatan, dan risiko itu akan semakin tinggi apabila masyarakat beraktivitas di dalam kerumunan. Sebagai salah satu upaya membatasi kerumunan, pemerintah sempat menutup sementara seluruh destinasi wisata, sehingga serta merta sektor pariwisata turut mengalami kelumpuhan akibat pandemi Covid-19 (Wallakula, 2020).

Sebagaimana diketahui, Bali merupakan destinasi wisata yang paling populer di Indonesia sejak tahun 1980an (Chong, 2019). Sehingga wajar bila perekonomian Bali (secara makro maupun mikro) ditopang dan sangat bergantung pada sektor pariwisata. Pariwisata Bali telah beberapa kali mengalami guncangan, pertama kasus perang Irak, selanjutnya perang Teluk, bom Bali 1, kasus SARS, bom Bali 2, kasus MERS, erupsi Gunung Agung dan saat ini pandemi Covid-19 yang ternyata berdampak lebih dahsyat bagi pariwisata Bali.⁹¹ Tabel 1 menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2020, jumlah kunjungan wisman langsung ke Bali tercatat hanya 22 kunjungan, turun hampir -100,00% (-99,996%) dibanding jumlah wisman di bulan Agustus 2019 sebanyak 606.412 kunjungan. Bila dibandingkan dengan catatan bulan Juli 2020, capaian wisman di bulan Agustus 2020 juga mengalami penurunan sedalam -53,19%. Sebagian besar wisman pada bulan Agustus 2020 datang melalui pintu udara (bandar udara) yakni sebanyak 12 kunjungan, sementara wisman yang melalui pintu laut (pelabuhan) tercatat 10 kunjungan.

⁹¹Disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam diskusi virtual Reaktivasi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru (22 Juli 2020) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200722164118-4-174679/gubernur-bali-covid-19-lebih-dahsyat-dari-bom-bali-1-dan-2>

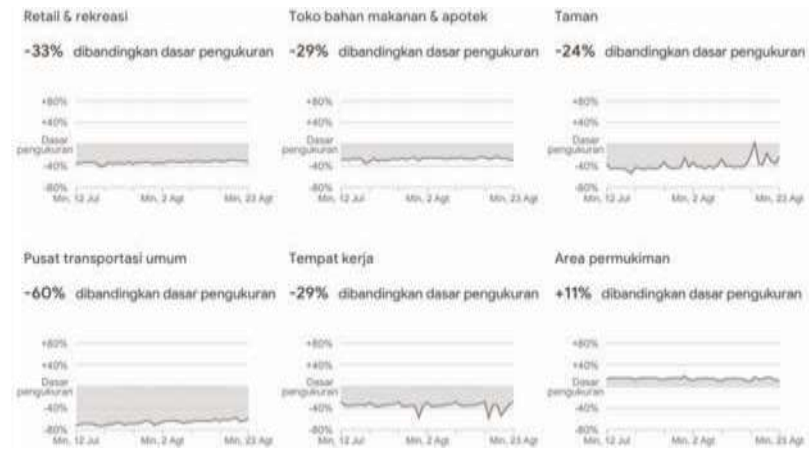
Tabel 1. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara langsung ke Provinsi Bali menurut pintu masuk pada Agustus 2019, Juli 2020, dan Agustus 2020

No.	Pintu Masuk	Jumlah Kunjungan			Perubahan (%)	
		Agustus 2019	Juli 2020	Agustus 2020	Agustus 2020 thd. Juli 2020	Agustus 2020 thd. Agustus 2019
1.	Bandara	602.457	16	12	-25,00	-99,998
2.	Pelabuhan	3.955	31	10	-67,74	-99,747
	Jumlah	606.412	47	22	-53,19	-99,996

Sumber: Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali, No. 60/10/51/Th. XIV, 1 Oktober 2020)

Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali fokus pada upaya pencegahan penyebaran serta penanganan Covid-19, sehingga pembatasan pergerakan masyarakat masih terus dilakukan. Bahkan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dibentuk hingga tingkat *grass root*, yaitu desa (baik Desa dinas maupun Desa Adat). Terbukti dari data *Google Mobility Report* (Gambar 1) bahwa pergerakan masyarakat di Provinsi Bali sejak pandemi Covid-19 termasuk yang paling rendah, terutama tren mobilitas ke tempat retail dan rekreasi serta pusat transportasi umum.

Gambar 1. Tren Mobilitas Masyarakat Bali Selama Pandemi Covid-19 (hingga 23 Agustus 2020)



Sumber: Google Mobility Report, 2020 (https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-08-23_ID_Mobility_Report_id.pdf)

Terhentinya aktivitas pariwisata Bali akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek domino bukan hanya bagi sektor pariwisata tetapi juga di hampir seluruh sektor di Bali. Selain itu, tenaga kerja sektor pariwisata banyak yang dirumahkan dan terancam mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana data pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Data Perusahaan, Pekerja Dirumahkan dan di-PHK pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali per September 2020

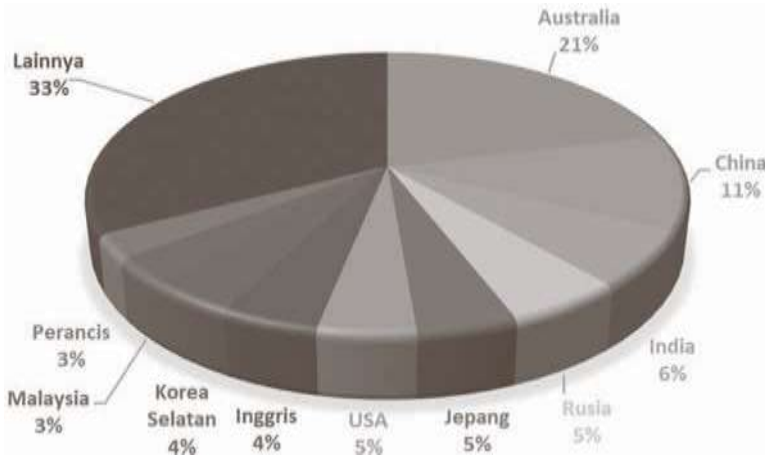
No.	Kabupaten/ Kota	Perusahaan (Unit)	Pekerja (Orang)	
			Dirumahkan	PHK
1.	Badung	532	42.409	1.551
2.	Denpasar	414	12.950	918
3.	Gianyar	174	12.394	397
4.	Tabanan	31	1.460	37
5.	Jembrana	22	430	0
6.	Buleleng	47	2.288	134
7.	Bangli	28	881	9
8.	Klungkung	71	1.769	0
9.	Karangasem	114	2.726	14
Jumlah		1.433	77.307	3.060

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali

Pemerintah tentu tidak dapat secara total menghentikan mobilitas masyarakat. Ketika masyarakat dianggap mampu beradaptasi dengan kenormalan baru atau *new normal*, maka pariwisata Bali juga mulai dibuka bagi wisatawan lokal dan domestik. Meskipun pariwisata Bali belum dibuka bagi wisatawan asing, namun minat wisatawan asing untuk berwisata ke Bali tetap tinggi, bahkan lebih dari 1 juta orang China menyatakan minatnya untuk mengunjungi Bali.⁹² Gambar 2 menyajikan komposisi kedatangan wisatawan menurut asal negara.

⁹²Disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat China dan Mongolia, <https://www.kabarbisnis.com/read/28100972/lebih-dari-1-juta-turis-china-siap-siap-serbu-bali>

Gambar 2.10 Negara Utama Kedatangan Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan (Januari-Agustus 2019 dan Januari-Agustus 2020)



Sumber: Diolah dari Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali, No. 60/10/51/Th. XIV, 1 Oktober 2020)

Bali selalu identik dengan pariwisata, dan *recovery* pariwisata Bali pada era *new normal* akan menjadi pionir bagi kebangkitan pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dan skenario percepatan *recovery* pariwisata Bali. Selain itu para pelaku usaha pariwisata juga perlu berupaya menyesuaikan diri mereka dengan standar protokol kesehatan agar pariwisata yang sesungguhnya bermotif ekonomi dapat diimbangi dengan perilaku pentingnya menjaga kesehatan.

Tujuan kajian ini adalah memotret kondisi perekonomian serta pariwisata Bali akibat dampak pandemi Covid-19, serta kebijakan pemerintah pusat maupun daerah sebagai respons atas dampak tersebut. Secara lebih spesifik, kajian ini bertujuan menyajikan rekomendasi skenario kebijakan pemerintah maupun *actions* para pelaku usaha pariwisata demi *recovery* pariwisata Bali di era *new normal*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pariwisata dan Mitigasi Bencana Akibat Pandemi Covid-19

Pariwisata merupakan suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, baik secara individu maupun kelompok, sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu (Kodhyat, 1983). Menurut Yoeti (2008), suatu kegiatan dapat disebut pariwisata bila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut, yaitu:

- 1) perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal;
- 2) tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau daya tarik wisata (DTW) yang dikunjungi;
- 3) uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan; dan
- 4) perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Ditinjau dari keempat kriteria tersebut, jelas bahwa kegiatan pariwisata serta merta terdampak atas pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah menganjurkan masyarakat agar tinggal di rumah saja (*stay at home*). Sesuai dengan pengertian dan kriteria tersebut, maka ketika pemerintah mengambil keputusan pemberlakuan pembatasan kegiatan dan pergerakan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona, maka dengan sendirinya kegiatan pariwisata akan sulit dilaksanakan. Transmisi Covid-19 dari manusia ke manusia telah dikonfirmasi (Huang *et al.*, 2020) dan mobilitas manusia juga merupakan faktor penguat persebaran Covid-19 (Fajar, 2000). Hasil penelitian Fajar (2020) menunjukkan bahwa

jumlah individu terinfeksi Covid-19 semakin meningkat hingga suatu saat nanti akan mencapai titik stabil. Terbukti dengan nilai R_0 ⁹³ sebesar 1,728 (> 1) dan R ⁹⁴ berkisar antara 2,892 hingga 5,667 (> 1).

Pandemi Covid-19 merupakan bencana non-alam (Agustin *et al.*, 2020), sehingga pemerintah menetapkan status darurat bencana di Indonesia. Secara umum, demikian menurut manajemen bencana, rangkaian fase penanggulangan bencana meliputi fase: mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Semakin merebaknya pandemi Covid-19 dapat menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk kerugian material, hingga korban jiwa. Potensi kerugian akibat bencana dapat dikurangi melalui mitigasi (Dewi & Istiadi, 2016). Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dan mencegah risiko kehilangan jiwa dan harta benda baik melalui pendekatan struktural maupun nonstruktural (Nursa'ban *et al.*, 2010). Mitigasi struktural merupakan upaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan fisik serta rekayasa teknis bangunan tahan bencana, sedangkan mitigasi nonstruktural adalah upaya pengurangan risiko bencana yang bersifat nonfisik seperti kebijakan, pemberdayaan masyarakat, penguatan institusi, kepedulian (Sugiharyanto *et al.*, 2014). Dalam mitigasi bencana, mitigasi nonstruktural lebih berkelanjutan karena memberikan keamanan jangka panjang (Dewi & Istiadi, 2016).

Mitigasi bencana melalui kearifan tradisional merupakan bentuk mitigasi nonstruktural. Kearifan tradisional adalah pengetahuan tradisional yang khas milik masyarakat atau budaya tertentu yang telah

⁹³Angka reproduksi dasar (R_0) merupakan rata-rata jumlah individu rentan yang terinfeksi (kasus sekunder) secara langsung oleh individu lain yang telah terinfeksi (kasus primer) dalam populasi yang masih rentan (Giesecke, 2002). $R_0 < 1$ mengindikasikan bahwa suatu penyakit menular pada suatu ketika tidak akan berhenti mewabah bahkan menghilang dengan sendirinya. $R_0 > 1$ mengindikasikan bahwa jumlah individu terinfeksi akan terus bertambah hingga mencapai titik ekuilibriumnya (Fajar, 2020).

⁹⁴Angka reproduksi (R) merujuk pada angka reproduksi efektif di mana terdapat intervensi ataupun imunitas pada penyakit menular tersebut (Fajar, 2020).

berkembang lama, dan merupakan hasil dari proses hubungan timbal-balik antara masyarakat dengan lingkungannya, menjadi acuan berperilaku, dipraktikkan dan diwariskan dari generasi ke generasi (Sartini, 2004; Wibowo *et al.*, 2012). Kearifan tradisional sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan (Wibowo *et al.*, 2012). Kearifan tradisional antara lain mengajarkan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam, melalui tabu, mitos dan ritual adat (Sartini, 2004; Wibowo *et al.*, 2012).

Fase pemulihan (*recovery*) merupakan fase akhir dari proses penanggulangan dampak bencana (Beach, 2010; Kusumasari, 2014) yang bertujuan mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena bencana (Sukmana, 2016). Dalam fase pemulihan di dalamnya meliputi juga upaya rehabilitasi dan rekonstruksi (Sukmana, 2016). Rehabilitasi merupakan perbaikan atau pemulihan aspek pelayanan publik pascabencana sedangkan rekonstruksi dilakukan dengan membangun kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana (Ramli, 2011).

22 Perencanaan dan Perencanaan Skenario

Perencanaan merupakan serangkaian proses penentuan tindakan masa depan yang disertai pertimbangan logis dan kontinu guna memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin agar dapat mencapai tujuan tertentu (Budiawan, 2019). Lebih lanjut Budiawan (2019) memaparkan prinsip-prinsip perencanaan yaitu (1) penentuan pilihan (*setting up choices*), (2) penetapan pengalihan sumberdaya (*resources allocation*), (3) penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan (*setting up goals and objectives*), (4) penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan (*setting up goals and objectives*), (5) berfikir secara sistematis, holistik, dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Lebih lanjut, perlu juga dipahami pengertian skenario karena skenario bukan merupakan *forecasting* (ramalan), visi atau kondisi pada masa depan, tetapi di dalam skenario terdapat unsur risiko (Budiawan, 2009). Schwartz (1991) mendefinisikan perencanaan skenario sebagai suatu alat perencanaan strategi yang efektif untuk perencanaan jangka menengah dan jangka panjang pada kondisi yang tidak pasti. Perencanaan skenario juga diartikan sebagai rencana masa depan di era ketika perencanaan strategi secara tradisional sudah dianggap usang.

Wrihatmolo (2015) menjelaskan enam faktor dalam perencanaan berbasis skenario, yang terdiri dari tiga faktor atau variabel utama dan tiga faktor perluasan (*expanded variables*). Skenario minimal merupakan fungsi dari (1) variabel hasil (*expected result*), (2) variabel kegunaan waktu (*time utility*), dan variabel kebutuhan sumber daya (*resources needed*). Sedangkan *expanded variables* yang dimaksud terdiri dari (1) variabel target, (2) variabel konsep/materi, dan (3) variabel manajemen pembangunan.

23 Tinjauan Hasil Studi Dampak Pandemi Covid-19 dan Kebijakan

Pandemi Covid-19 menimbulkandampak signifikan bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Ozili & Arun (2020) memaparkan bahwa *social distancing* memengaruhi aktivitas ekonomi dan indeks pasar saham. Ozili & Arun (2020) lebih lanjut juga menemukan bahwa peningkatan jumlah hari *lockdown*, keputusan kebijakan moneter, dan pembatasan perjalanan internasional sangat memengaruhi tingkat kegiatan ekonomi global.

Untuk mengurangi penyebaran pandemi ini, semua negara telah memberlakukan *lockdown* secara luas, perjalanan internasional terbatas, larangan bagi semua pengunjung asing, pembatasan perjalanan dari berbagai tempat dengan kasus yang dikonfirmasi, pembatasan lain seperti menanggulangi semua iklan penerbangan internasio-

nal, semua pelancong yang dikenai karantina 14 hari, semua penerbitan VISA ditangguhkan (Bloomberg, 2020; Haryanto, 2020). UNWTO (2020) telah menemukan bahwa 93% tempat-tempat destinasi di Eropa telah menutup sepenuhnya perbatasan untuk pariwisata internasional. Di Amerika, proporsi ini mencapai 82%, di Asia dan Pasifik 77%, di Timur Tengah 70% dan Afrika 60%. Penutupan pariwisata secara global ini jelas akan terkait dengan pariwisata Bali yang merupakan daerah tujuan wisata dunia.

Sejak pandemi Covid-19 yang berawal dari kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 telah meluas, penelitian mengenai Covid-19 juga mulai dilakukan secara holistik. Penelitian ini berupaya melengkapi penelitian mengenai dampak pandemi Covid-19 serta menganjurkan rekomendasi skenario kebijakan, khususnya pada sektor pariwisata Bali. Meskipun timbul sikap pesimis bahwa apapun skenarionya, pengeluaran pariwisata akan menurun tajam dalam jangka panjang sehingga berdampak signifikan pada perekonomian (Cetin, 2020). Namun periode ini juga bisa dianggap sebagai suatu peluang untuk memperbaiki masalah struktural pada industri terkait keberlanjutan, eksploitasi berlebihan akibat pariwisata, perubahan iklim, dan tata kelola destinasi (Seraphin *et al.*, 2019).

Dalam upaya mengantisipasi dan mengatasi dampak Covid-19 sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah seharusnya bertindak cepat. Namun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dinilai kurang optimal dan berdampak pada semakin tersebarnya Covid-19 di Indonesia (Juaningsih *et al.*, 2020). Temuan penelitian Agustino (2020) mengenai analisis kebijakan penanganan wabah Covid-19 di Indonesia juga mengemukakan adanya narasi negatif dan lambannya respons pemerintah atas penyebaran Covid-19. Narasi-narasi yang disampaikan oleh elite politik sebelum Covid-19 masuk ke Indonesia menunjukkan nihilnya perasaan adanya krisis (*sense of crisis*) yang mengancam sehingga memperlambat pengambilan keputusan. Kedua, lemahnya koordinasi antar-stakeholder, khususnya antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan koordinasi ini mengakibatkan pengendalian virus korona menjadi terkatung-katung. Ketiga, ketidakacuhan atau ketidakpatuhan warga terhadap himbauan pemerintah. Dampaknya, upaya penanganan menjadi tersendat karena tidak didukung oleh masyarakat luas. Kombinasi dari ketiga faktor inilah yang memperumit upaya pemerintah mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia (Agustino, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah *model-building method* dengan *descriptive approach*. Melalui pendekatan deskriptif akan diperoleh hasil analisis berupa deskripsi dengan kata-kata mengenai: Pertama, bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan pariwisata Bali. Kedua, kebijakan apa yang telah dirancang atau dilakukan pemerintah untuk merespons dampak Covid-19. Ketiga, bagaimana skenario *recovery* pariwisata Bali di era *new normal*, baik *short term* maupun *long term*. Penelitian deskriptif masih sangat diperlukan dalam penelitian tentang pariwisata, apalagi inventaris dan deskripsi dasar juga kerap kalimembantu dalam pengambilan keputusan (Chen, 2001). *Model-building method* sendiri digunakan untuk mengkonstruksikan rekomendasi kebijakan didasarkan pada temuan di lapangan (Herdiana, 2020). Penyusunan rencana skenario kebijakan menggunakan variabel-variabel perencanaan skenario dari Wrihatnolo (2015), yaitu variabel hasil, kegunaan waktu dan kebutuhan sumber daya sebagai variabel utama, dan variabel target, konsep/materi, dan manajemen pembangunan sebagai *expanded variables*.

Data yang disajikan pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. *Documentary study* dilakukan terhadap data atau dokumen yang dianggap relevan dengan penelitian yang tengah dilakukan, baik dari sumber buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laman web maupun sumber referensi lainnya

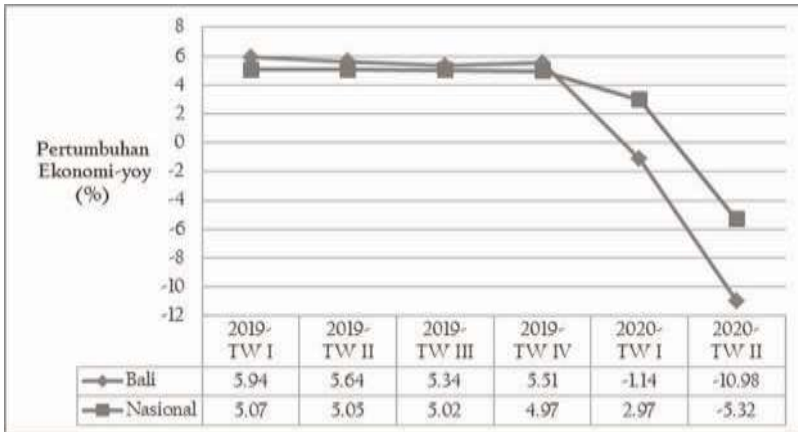
(Herdiana, 2020). Data-data pada penelitian ini sebagian besar diperoleh melalui data yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi pemerintah, seperti BPS, BI, maupun badan/dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali. Penelitian ini lebih difokuskan diprovinsi Bali dan dilaksanakan pada rentang waktu setelah semester I-2020 agar periode data yang digunakan konsisten.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Perekonomian dan Pariwisata Bali Akibat Pandemi Covid-19

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tercatat mengalami kontraksi selama semester I-2020, di mana BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I-2020 terkontraksi -1,14% *year on year* (yoy) dan pada triwulan II-2020 bahkan terkontraksi lebih dalam hingga -10,98%. Pertumbuhan ekonomi Bali maupun Nasional tercatat sebagai pertumbuhan terendah selama satu dasawarsa terakhir, dan pada dasawarsa ini juga pertama kalinya pertumbuhan ekonomi Bali terkontraksi. Kondisi ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan berbagai negara menerapkan *travel restriction* dan/atau *lockdown* (Bank Indonesia, 2020) sehingga kegiatan pariwisata Bali seketika berada di titik nadir.

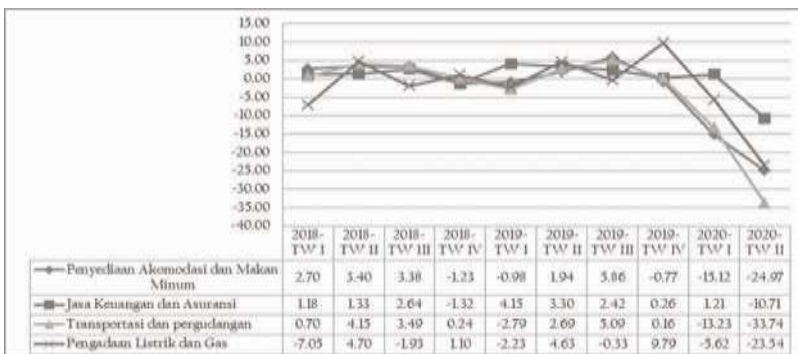
Gambar 2. Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan (%) Ekonomi Bali dan Nasional pada Triwulan I-2019 sampai dengan Triwulan II-2020



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Bali, 2020

Apabila ditinjau secara lebih mendalam terkait kontribusi masing-masing sektor utama terhadap perekonomian Bali, maka akan terlihat kaitannya dengan sektor pariwisata Bali, sebagaimana Gambar 3.

Gambar 3. Grafik Laju Pertumbuhan (%) Beberapa Lapangan Usaha Secara Triwulanan Tahun 2018-2020 (q to q) di Provinsi Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali, 2020

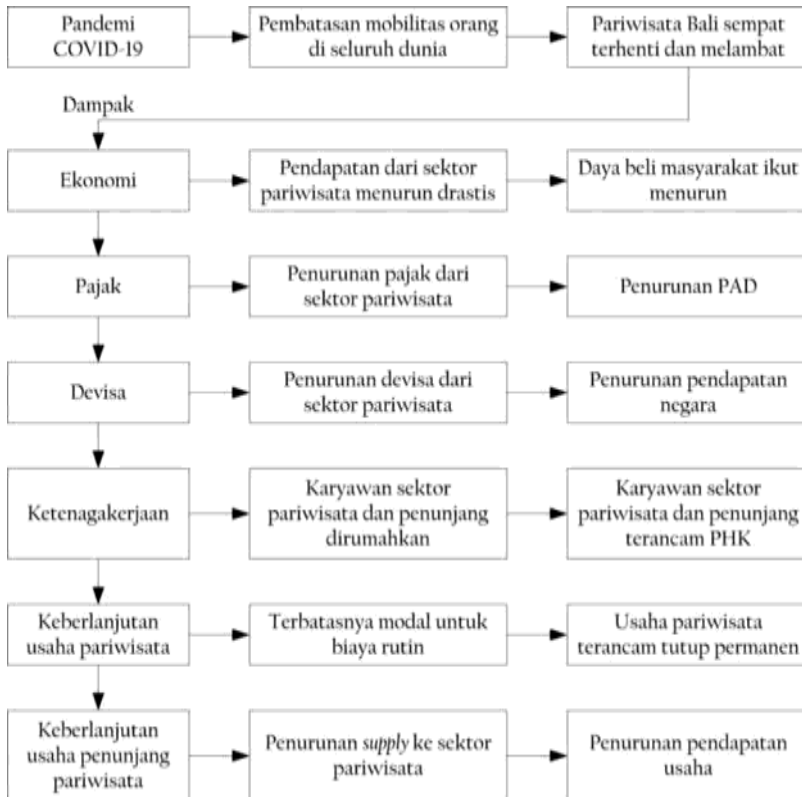
Penurunan kategori I (penyediaan akomodasi dan makan minum) dan kategori III (transportasi dan pergudangan) pada triwulan II-2020 berkaitan erat dengan penurunan aktivitas pariwisata di Bali. Pariwisata merupakan penopang utama perekonomian Bali, sedangkan sektor-sektor lain kebanyakan merupakan penunjang sektor pariwisata. Akibatnya ketika pariwisata mengalami guncangan hebat akibat pandemi Covid-19 maka akan memicu dampak ikutan terhadap sektor-sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada bulan Agustus 2020 hanya 22 orang atau turun sedalam -99,99 (yoy). Demikian pula Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada periode yang sama tercatat hanya 2,45%, yaitu mengalami penurunan sedalam -94,37% (yoy) (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020). Apabila kita mencermati model Input-Output sektor pariwisata Bali, sesuai hasil penelitian Antara (2012), disebutkan bahwa sektor-sektor pariwisata Bali memiliki *indirect backward* dan *forward linkage* yang sangat kuat, yang ditunjukkan dengan KTBj⁹⁵ sebesar 1,630 dan KTDi⁹⁶ sebesar 1,267. Artinya setiap peningkatan permintaan akhir usaha kecil pada sektor pariwisata sebesar satu unit, mampu meningkatkan output seluruh sektor perekonomian di Bali sebesar 1,639 unit dan setiap peningkatan permintaan akhir seluruh sektor perekonomian di Bali sebesar satu unit, usaha kecil pada sector pariwisata di Bali mampu memenuhinya sebesar 1,267 unit.

Secara umum, dampak pandemi Covid-19 terhadap pariwisata dapat dikategorikan dalam beberapa bidang. Gambar 4 menguraikan bahwa *physical distancing* serta himbauan *stay home* telah menghentikan sementara aktivitas pariwisata Bali. Hal tersebut berdampak serius bagi perekonomian Bali (termasuk pendapatan masyarakat), perolehan devisa dan pajak, ketenagakerjaan, serta keberlanjutan usaha pariwisata dan usaha penunjang pariwisata.

⁹⁵Keterkaitan tidak langsung ke belakang sektor j.

⁹⁶Keterkaitan tidak langsung ke depan sector i.

Gambar 4. Identifikasi Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata Bali



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020

Terhentinya sementara pariwisata Bali selama beberapa bulan di awal tahun 2020 membuat perekonomian turun drastis, di mana pendapatan masyarakat (terutama pelaku pariwisata) berkurang dan bahkan hampir tidak ada pemasukan dari sektor pariwisata. Para pemilik usaha jasa pariwisata bahkan menderita kerugian ekonomi karena aktivitas pengelolaan usaha tetap berjalan, seperti pemeliharaan fasilitas pariwisata, pembayaran tagihan air dan listrik, pengeluaran untuk gaji karyawan (baik yang masih bekerja maupun dirumahkan), dan komponen rutin lainnya (Herdiana, 2020). Kerugian besar para pelaku usaha pariwisata akibat ketidakseimbangan antara

pemasukan dan pengeluaran menjadi beban untuk mengembalikan kegiatan pariwisata. Karena pemasukan yang mengalami penurunan mengakibatkan daya beli masyarakat juga menurun. Penurunan daya beli mengakibatkan terjadinya deflasi di Bali.

Penurunan aktivitas pariwisata di Bali juga berdampak langsung terhadap perolehan pajak dari sektor pariwisata, terutama Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PHR merupakan salah satu pajak daerah (kabupaten/kota) dan merupakan sumber utama PAD kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan PAD tertinggi di Bali yang sumber PAD-nya berasal dari PHR. Rasionalisasi PAD Kabupaten Badung akibat dampak pandemi Covid-19 mencapai Rp2,7 triliun atau berkurang sebesar 49,06% dari APBD Induk tahun anggaran 2020.⁹⁷

Selain berdampak terhadap penurunan perolehan pajak (terutama pajak daerah), terhentinya pariwisata sementara akibat pandemi Covid-19 juga menyebabkan penurunan perolehan devisa. Penurunan devisa akibat wisatawan asing yang masuk ke Indonesia sekitar USD 2 Miliar,⁹⁸ dan perlu dicatat bahwa tujuan destinasi wisata dari 40% wisatawan asing yang masuk ke Indonesia adalah Bali.⁹⁹ Selain penurunan devisa akibat berkurangnya wisatawan yang masuk, devisa juga disinyalir mengalami penurunan akibat pembatalan warga Indonesia ke luar negeri.

⁹⁷Disampaikan Bupati Badung saat membacakan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung (24 Agustus 2020), dimuat di harian Tribun Bali (25 Agustus 2020).

⁹⁸Disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, mengutip pernyataan Gubernur Bank Indonesia, <https://penabali.com/bali/denpasar/dampak-pandemi-covid-19-ekspor-indonesia-alami-penurunan/#!>

⁹⁹Pernyataan Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, <https://www.antaraneews.com/berita/1658566/kemenparekraf-dukung-pemda-datangkan-lagi-wisatawan-saat-covid-19>

Berdasarkan survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, perlambatan sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19 membuat pendapatan 1.285.000 orang terdampak, dengan rincian sesuai Tabel 1. Meskipun membatasi mobilitas masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 551 Tahun 2020 (angka 2-point f) memperbolehkan pekerja asal luar Bali untuk pulang ke daerahnya masing-masing.

Tabel 1. Uraian dan jumlah tenaga kerja di Bali yang terdampak akibat perlambatan pariwisata

No.	Sektor	Jumlah (orang)
1.	Tenaga kerja di sektor hotel dan restoran	300.000
2.	Tenaga kerja di sektor perdagangan	550.000
3.	Tenaga kerja di sektor transportasi	75.000
4.	Tenaga kerja di sektor industri penunjang pariwisata	360.000
Total		1.285.000

Sumber: Survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (2020)¹⁰⁰

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa para pelaku usaha pariwisata tetap harus mengeluarkan berbagai biaya meskipun aktivitas pariwisata terhenti sementara. Misalnya, biaya listrik, air, serta pemeliharaan fasilitas hotel yang tetap harus dibayar meskipun tidak ada orang yang menginap. Berbeda lagi dengan komponen biaya pada kebun binatang, di mana pengelola harus tetap menyediakan pakan bagi hewan-hewan yang ada. Keberlanjutan penyelenggaraan usaha pariwisata salah satunya tergantung pada sisi modal yang dimiliki oleh pelaku usaha pariwisata agar bisa bertahan dan melakukan pemulihan (Herdiana, 2020), oleh karenanya para pelaku usaha pariwisata di Bali melakukan pemotongan biaya hingga 57% (Kopernik, 2020). Bila para pelaku usaha pariwisata memi-

¹⁰⁰Disampaikan Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali <https://www.balipost.com/news/2020/04/03/113452/Covid-19,Sejutaan-Naker-di-Bali...html>

liki keterbatasan modal, bukan tidak mungkin mereka harus menghentikan aktivitas usaha pariwisatanya secara permanen. Hasil survei Kopernik menunjukkan bahwa 11% pemilik usaha di Bali memutuskan untuk menutup permanen usahanya, 22% menutup sementara, dan sisanya sebesar 44% hanya menutup usahanya selama beberapa bulan.

Berbagai sektor penunjang pariwisata, seperti akomodasi, industri kerajinan, transportasi bahkan sampai pada sektor pertanian pun terdampak akibat perlambatan pariwisata Bali. Sektor biro perjalanan wisata di Bali berpotensi kehilangan pendapatan Rp5 triliun hingga akhir tahun 2020.¹⁰¹ Menurut BBC Indonesia, pada triwulan I-2020 saja, sektor akomodasi, makanan, dan minuman telah berkontraksi hingga -9,11%. Contohnya pada sektor industri kerajinan yang sebelumnya diproduksi untuk memenuhi permintaan wisatawan, kini sebagian besar toko kerajinan tutup. Dilansir dari Channel News Asia,¹⁰² di mana sejumlah galeri dan toko furniture di Kerobokan, Kuta yang sebelum pandemi Covid-19 ramai dikunjungi pelanggan asing kini tampak seperti kota mati. Sektor pertanian juga ikut terdampak karena produk pertanian (standar hotel)¹⁰³ yang sebelumnya di-*supply* ke hotel dan restoran sekarang hanya menumpuk di pasar dan harga jualnya rendah, sehingga pendapatan petani juga mengalami penurunan.¹⁰⁴

¹⁰¹Disampaikan oleh Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASITA) Provinsi Bali <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53565487>

¹⁰²<https://travel.detik.com/travel-news/d-5183421/duka-perajin-di-bali-saat-corona-toko-sepi-hingga-gagap-teknologi>

¹⁰³Produk pertanian standar hotel yang selama ini dikembangkan petani Bali seperti selada, baby romaine, bayam inggris, paprika, asparagus, beef tomato, beet root, baby bean, zucinni, dan beberapa jenis lainnya.

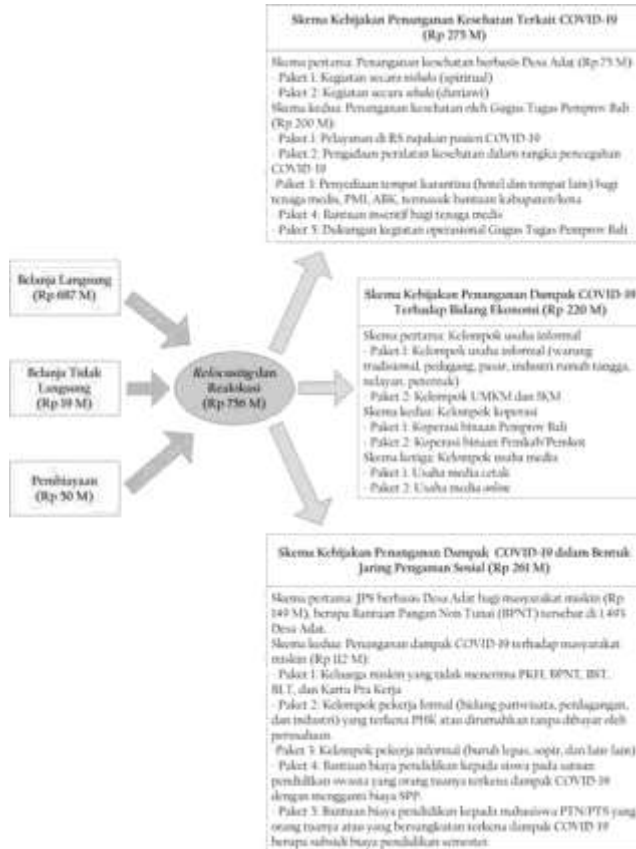
¹⁰⁴Disampaikan oleh I Gusti Made Japa (petani asal Desa Pancasari, Tabanan), <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/09/28/216307/pariwisata-bali-mandek-hasil-pertanian-dibiarkan-membusuk>

4.2 Kebijakan Pemerintah untuk Merespons Dampak Pandemi Covid-19

Pemerintah Provinsi Bali juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta menginstruksikan pembentukan Satgas hingga tingkat *grassroot* yaitu pada tingkat Desa (desa dinas) dan Desa Adat. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, APBD Provinsi Bali difokuskan kembali (*refocusing*) pada program kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 atas tiga aspek, yaitu penanganan masalah kesehatan terkait Covid-19, pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak, dan pelaksanaan jaring pengaman sosial (JPS).¹⁰⁵ *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Bali disajikan pada Gambar 5.

¹⁰⁵Pemaparan Kepala BAPPEDA Provinsi Bali pada saat wawancara live via telepon dengan Bali TV, <https://bappeda.baliprov.go.id/2020/04/16/ini-kebijakan-anggaran-pemprov-bali-dalam-penanganan-covid-19/>

Gambar 5. Skema *Refocusing* dan Realokasi Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020 untuk Penanganan Covid-19



Sumber: Disusun ulang berdasarkan data dari BAPPEDA Provinsi Bali, 2020

Pemerintah pusat telah merespons secara cepat dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata, termasuk Bali yang merupakan destinasi tujuan wisata utama di Indonesia. Berikut empat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk membantu *recovery* pariwisata dan perekonomian, yaitu:

- 1) Pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp298,5 miliar untuk insentif *airline* dan *travel agent* dalam rangka mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia.

- 2) Wisatawan dalam negeri diberikan insentif dalam bentuk diskon sebesar 30% potongan harga untuk 25% seat penerbangan pesawat yang menuju ke sepuluh destinasi wisata utama di Indonesia, di mana total anggaran yang disiapkan untuk kebijakan ini sebesar Rp443,39 miliar. Ke sepuluh destinasi pariwisata tersebut adalah (1) Danau Toba, (2) Yogyakarta, (3) Malang, (4) Manado, (5) Bali, (6) Mandalika, (7) Labuan Bajo, (8) Bangka Belitung, (9) Batam, dan (10) Bintan.
- 3) Ke sepuluh destinasi pariwisata tersebut (yang tersebar di 33 kabupaten/kota) tidak dipungut pajak hotel dan restoran (sebesar 10%) selama 6 (enam) bulan. Sebagai dampak kemungkinan penurunan PAD karena pengurangan sumber Pajak Hotel dan Restoran, Pemerintah Pusat akan memberikan hibah sebesar Rp3,3 triliun kepada sepuluh destinasi wisata tersebut.
- 4) Konversi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata pada APBN Tahun 2020 menjadi hibah ke daerah-daerah untuk memacu pariwisatanya.¹⁰⁶

Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Bali, memang telah menyusun paket kebijakan sebagai dampak pandemi Covid-19 sebagaimana dipaparkan pada Gambar 5. Namun demikian, Provinsi Bali juga sungguh memerlukan paket kebijakan yang khusus menya-sar pada upaya *recovery* pariwisata Bali.

43 Rekomendasi Skenario *Recovery* Pariwisata Bali

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat menetapkan 3 (tiga) kriteria dengan 11 indikator bagi daerah di Indonesia agar dapat membuka kembali kegiatan ekonominya. Salah satu indika-

¹⁰⁶Penjelasan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali melalui Pers Release <https://www.baliprov.go.id/web/pers-release/>

tornya adalah penurunan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 selama dua minggu terakhir minimal 50% sejak puncak penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19.¹⁰⁷

Awalnya pariwisata Bali direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dibuka bagi wisatawan asing pada 11 September 2020, namun Pemerintah Pusat mengeluarkan keputusan pembatalan rencana pembukaan wisata Bali bagi wisatawan asing. Pertimbangan utamanya adalah karena belum ada satu pun negara di dunia yang memberlakukan kebijakan yang mengizinkan warganya berwisata ke luar negerinya, bahkan di beberapa negara masih memberlakukan pembatasan aktivitas secara ketat.¹⁰⁸

Berharap pada pengalihan sektor unggulan dari sektor pariwisata ke sektor lain (seperti pertanian) dalam waktu yang singkat tentu bukanlah solusi yang bisa dilaksanakan dengan mudah, karena rendahnya tingkat permintaan serta sumber daya manusia yang tidak siap.¹⁰⁹ Oleh sebab itu, dalam upaya *recovery* sektor pariwisata Bali, dimulainya era *new normal* perlu direspons secara positif oleh pemerintah, melalui kebijakan yang membantu percepatan *recovery* pariwisata serta membantu pelaku-pelaku wisata, seperti menyediakan hibah bagi merekasertapemotongan pembayaran pajak maupun bagi para pelaku usaha pariwisata itu sendiri. Menyambut pariwisata di era *new normal*, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menyiapkan protokol kesehatan dan pedoman teknis bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, mulai dari penge-

¹⁰⁷Disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali yang juga Ketua PHRI Bali pada wawancara khusus dengan stasiun televisi nasional (13 Juni 2020) <https://www.redaksi9.com/read/2253/Dampak-Pandemi-Covid-19--Momentum-Menata-Pariwisata-Bali-lebih-Terarah.html>

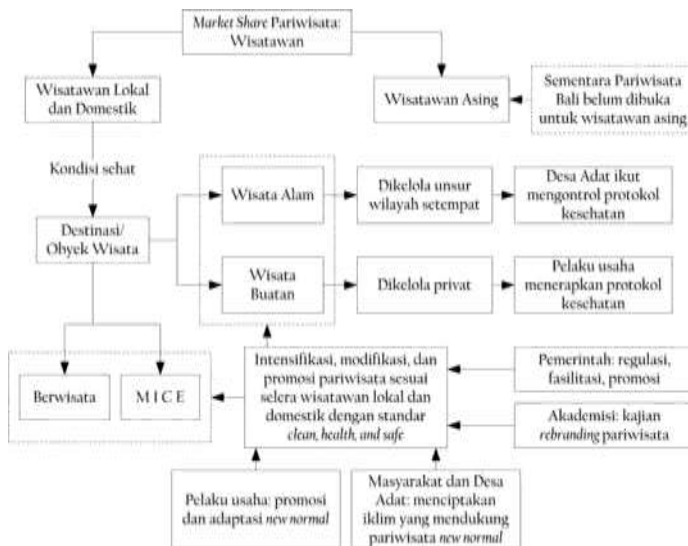
¹⁰⁸Penjelasan Gubernur Bali <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200824163813-4-181594/ri-batal-buka-turis-asing-mulai-11-september-ini-penyebabnya>

¹⁰⁹Dilansir BBC Indonesia dari acara diskusi program “Bali’s New Era” <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54843564>

lola wisata, pemandu, tamu, kelompok masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa, melalui strategi dan program *cleanliness, health, and safety (CHS)*.¹¹⁰

Sebelum membahas skenario *recovery* pariwisata Bali, terlebih dahulu perlu dipaparkan *framework* sebagaimana yang diperlihatkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Framework untuk Penyusunan Skenario Recovery Pariwisata Bali Sebagai Dampak Pandemi Covid-19



Sumber: Hasil analisis peneliti, 2020

Framework penyusunan skenario *recovery* sektor pariwisata Bali yang sesuai dengan Gambar 6 diawali dengan menentukan target utama, yakni wisatawan lokal (wisatawan dari Bali) dan domestik (wisatawan Indonesia dari luar Bali). Hal ini penting, mengingat be-

¹¹⁰Disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf pada Webinar dengan tajuk ‘Government Round Table-Covid 19: New, Next, Post – Strategi dan Program *cleanliness, health, and safety (CHS)* Destinasi Pariwisata Pasca Pandemi’ <https://travel.detik.com/travel-news/d-5082243/persiapan-kemenparekraf-sambut-wisatawan-di-new-normal>

lum adanya sinyal kepariwisataan di Indonesia yang dibuka untuk wisatawan asing. Dengan menentukan target wisatawan tersebut, para pelaku usaha pariwisata harus melakukan penyesuaian produk dan layanan agar sesuai dengan minat dan daya beli lokal.

Wisatawan yang akan berkunjung ke Bali memiliki pilihan dua tujuan wisata secara umum, yaitu wisata alam dan wisata buatan. Pangsa pasar wisatawan lokal dan domestik sesungguhnya sasaran yang sangat potensial dan menjadi harapan bagi *recovery* pariwisata dalam jangka pendek. Selain itu, industri *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) juga merupakan sektor yang sangat potensial agar dapat dikembangkan kembali pada era *new normal* nanti.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan Desa Adat di Bali memiliki peran penting dalam pengaturan tata kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, dalam penerapan protokol kesehatan pada wisata alam, pemerintah perlu mensosialisasi dan memfasilitasi pengelolaannya dengan menggandeng Desa Adat. Kawasan wisata alam menjadi destinasi wisata yang pertama kali dan secara bertahap dibuka untuk umum (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 261/MENLHK/KSDAE/KSA.0/6/2020 tanggal 23 Juni 2020). Pembukaan kawasan wisata alam ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masyarakat membutuhkan rekreasi yang relatif aman dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Adapun protokol kesehatan di kawasan wisata alam secara umum sebagaimana infografis pada laman kemenparekraf.go.id antara lain adalah (1) pembatasan jumlah pengunjung (10-30% dari daya tampung), (2) jaga jarak (1-2 meter), (3) penggunaan masker dan *hand sanitizer*, (4) pemeriksaan suhu tubuh, (5) dokumen surat sehat, (6) pendakian *one-day trip*. Infografis pada laman kemenparekraf.go.id juga menampilkan informasi protokol kesehatan bagi pengelola/pelaku usaha kreatif di antaranya: (1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 di wilayahnya, (2) Memastikan

pekerja dan konsumen yang terlibat di dalam jasa ekonomi kreatif secara jasmani berada dalam kondisi sehat melalui tindakan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk dan bila ditemukan pelaku wisata yang kondisinya kurang sehat maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan, (3) melakukan pengaturan jarak fisik antar individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi kreatif minimal berjarak 1 meter, (4) membatasi jumlah kru/personil yang terlibat dengan menggunakan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*face shield*), dan lain-lain, (5) menyediakan fasilitas cuci tangan atau *hand sanitizer*, (6) melakukan tindakan pembersihan (*disinfectant*) secara berkala (minimal tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama, (7) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari agar masuk di ruangan kerja, (8) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pekerja dan semua personil yang terlibat di dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan Co-vid-19, (9) larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, (10) meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan melakukan koordinasi secara daring, membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya. Kendala penerapan protokol kesehatan adalah terbatasnya anggaran pengelola kawasan wisata alam untuk menyediakan sarana protokol kesehatan yang lengkap. Hasil observasi di beberapa kawasan wisata alam di Bali menunjukkan bahwa pada kawasan wisata alam cukup sulit mengatur wisatawan agar bertindak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Terkait pelaksanaan protokol kesehatan di kawasan wisata alam, pemerintah dapat bekerjasama dengan Desa Adat karena karakter masyarakat Bali sangat patuh dengan pengaturan Desa Adat. Bali merupakan salah satu provinsi yang tidak menetapkan PSBB tapi menunjukkan angka laju penambahan positif berkurang. Selain itu, tingkat kesembuhan pasien positif Covid-19 di Bali juga tinggi, dan angka kematian positif Covid-19 yang rendah (Gambar 7). Bali me-

manfaatkan kearifan lokal, menggerakkan desa adat, dan melakukan gotong royong berbasis adat.¹¹¹ Sedangkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan pada destinasi wisata buatan, termasuk pelaku usaha kreatif menjadi tanggung jawab pelaku usaha dengan pengawasan penuh dari pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten/kota.

**Gambar 7. Dinamika Covid-19 di Provinsi Bali
(per 29 Agustus 2020)**



Sumber: Press Release Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali

Bali juga berpeluang melakukan *recovery* pariwisata melalui penyelenggaraan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*). Hal ini mengingat Bali memiliki sarana dan prasarana MICE berskala besar dan internasional. Perkembangan transportasi udara Provinsi Bali pada Agustus 2020 sudah mulai menunjukkan pergerakan. Penerbangan domestik tercatat sebanyak 1.134 penerbangan, atau

¹¹¹Disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah pimpinan daerah yang menerapkan PSBB dan beberapa kepala daerah yang tidak menerapkan PSBB, Selasa 12 Mei 2020, <https://republika.co.id/berita/qa7slu370/belajar-dari-bali-tekan-kasus-covid19-tanpa-psbb>

meningkat 73,13% (*m to m*), demikian halnya penerbangan internasional juga meningkat 55,26% (*m to m*) meskipun baru sebanyak 59 penerbangan.¹¹² Pemerintah Provinsi Bali perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar MICE yang difasilitasi pemerintah dapat diselenggarakan di Bali. Pariwisata Bali juga perlu melakukan intensifikasi dengan mengembangkan jenis pariwisata baru atau melakukan penyesuaian terhadap model pariwisata yang telah ada sehingga sesuai dengan era *new normal*. Disinilah peran akademisi untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Contohnya seperti pengembangan model *spiritual healing* dalam pariwisata Bali. Spiritual healing merupakan pembangunan kesehatan jasmani, pikiran, dan spirit yang telah menjadi pariwisata alternatif (Sutarya & Sirtha, 2017).

Berdasarkan *framework* (Gambar 6) serta *desk study* maka dapat disusun matriks skenario *recovery* kebijakan pariwisata Bali yang menitikberatkan pada orientasi *market share* atau dalam hal ini jenis wisatawan juga ditinjau dari variabel dalam perencanaan skenario.

Tabel 2. Skenario *recovery* pariwisata Bali dengan orientasi wisatawan domestik dan mancanegara

No.	Variabel	Skenario 1 [*]	Skenario 2 ^{**}
1.	Hasil (<i>expected result</i>)	Normalisasi pariwisata Bali	Normalisasi pariwisata Bali
2.	Target	Peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Bali	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali
3.	Konsep/materi	Bali memiliki daya tarik wisata dan sarana penunjang pariwisata lengkap dengan harga yang variatif. Sarana penyelenggaraan MICE untuk skala nasional juga tersedia.	Potensi pariwisata Bali terkenal hampir di seluruh dunia. Tersedia fasilitas pariwisata berstandar internasional.

¹¹²Berita Resmi Statistik Perkembangan Transportasi Provinsi Bali, No. 61/10/51/Th.VII, 1 Oktober 2020

4. Kegunaan waktu (<i>time utility</i>)	<i>Short term</i> (saat ini) dan berlanjut pada <i>long term</i> .	Diawali ketika penerbangan internasional mulai dibuka dan tidak ada <i>travel warning</i> dan untuk <i>long term</i> .
5. Kebutuhan sumberdaya (<i>resources needed</i>)	Implementasi protokol kesehatan di seluruh obyek wisata serta sarana penunjang wisata. Produk wisata sesuai dengan selera wisatawan domestik.	Produk wisata inovatif dan sesuai selera wisatawan mancanegara, termasuk standar kesehatan.
6. Manajemen pembangunan	Pemerintah Provinsi Bali secara intens mensosialisasikan protokol kesehatan dan percepatan sertifikasi kesehatan tempat wisata. Selain itu tetap menghimbau masyarakat agar tetap disiplin melakukan protokol kesehatan sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Selanjutnya dilakukan berbagai kebijakan promosi dengan target wisatawan domestik.	Pemerintah dapat memberikan insentif melalui VISA gratis atau insentif lainnya bagi wisatawan mancanegara. Promosi tentang wisata sehat dilakukan keberbagai negara. Pemerintah juga perlu secara disiplin melakukan monitoring implementasi protokol kesehatan.

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2020

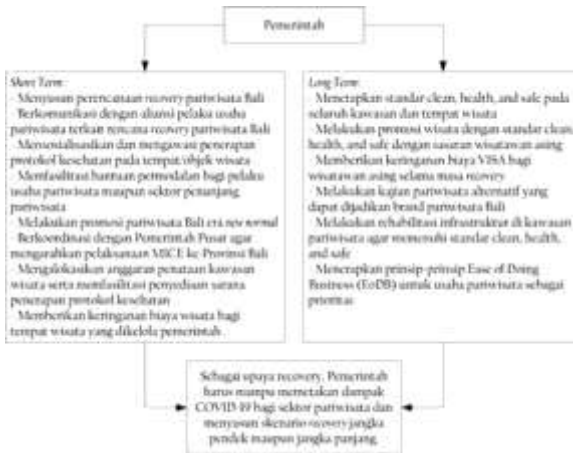
*) Skenario 1 adalah *recovery* pariwisata dengan pangsa pasar wisatawan domestik.

***) Skenario 2 adalah *recovery* pariwisata dengan pangsa pasar wisatawan mancanegara.

Upaya *recovery* pariwisata Bali akibat terdampak pandemi Covid-19 tentu tidak dapat dilakukan dengan cepat, karena akan berkaitan dengan kondisi masyarakat di daerah atau negara lainnya. Oleh karena itu, perlu upaya yang bersifat *short term* maupun *long term* sebagai langkah nyata *recovery* di era *new normal*. Secara lebih spesifik, Gambar 8 menampilkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah baik kebijakan *short term* maupun *long term*.¹¹³

¹¹³*Short term* adalah kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat (maksimal satu tahun), sedangkan *long term* adalah kebijakan yang diimplementasikan untuk orientasi jangka panjang.

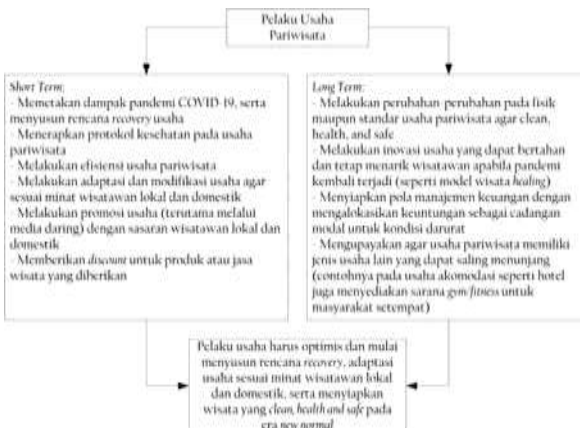
Gambar 8. Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk *Recovery* Pariwisata Bali



Sumber: Hasil analisis peneliti, 2020

Pelaku usaha pariwisata tentu saja juga berperan penting dan merupakan ujung tombak *recovery* pariwisata Bali. Gambar 8 menyajikan rekomendasi *actions* bagi pelaku usaha pariwisata demi terwujudnya *recovery* pariwisata Bali.

Gambar 9. Rekomendasi *Actions* Pelaku Usaha Pariwisata untuk *Recovery* Usaha Wisata



Sumber: Hasil analisis peneliti, 2020

Sinergi seluruh *stakeholders* pariwisata Bali bersama masyarakat sangatlah penting dalam upaya *recovery* pariwisata Bali. Bagaimana-pun juga, *image* yang timbul atas kondisi pariwisata Bali akan sangat menentukan minat wisatawan untuk berwisata ke Bali. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 disinyalir masih akan berlangsung lama, meskipun diyakini berangsur membaik, namun pariwisata yang mengusung konsep *cleanliness, health, and safety* perlu tetap dilaksanakan secara konsisten sehingga *recovery* ekonomi dapat seimbang dengan pemenuhan standar kesehatan.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian Bali mengalami kontraksi pada semester pertama tahun 2020 sebagai dampak pembatasan kegiatan pariwisata yang merupakan sektor utama penopang perekonomian Bali. Dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata di Bali selain menurunkan pendapatan masyarakat, juga menurunkan perolehan devisa dan pajak, membuat banyak tenaga kerja dirumahkan bahkan di-PHK, serta mengancam keberlanjutan usaha pariwisata maupun industri penunjang pariwisata.

Pemerintah Provinsi Bali juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga tingkat Desa dan Desa Adat, sebagaimana instruksi Pemerintah Pusat. Kebijakan realokasi anggaran tahun 2020 difokuskan dan direalokasi untuk penanganan bidang kesehatan terkait Covid-19, penanganan bidang ekonomi yang terdampak Covid-19, serta pemberian Jaring Pengaman Sosial.

Pemerintah Pusat juga telah melakukan kebijakan bagi *recovery* pariwisata pada sepuluh destinasi utama, termasuk Bali, meskipun untuk sementara waktu kegiatan wisata hanya ditujukan bagi wisatawan domestik. Pemerintah (khususnya Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali) serta pelaku usaha pariwisata direkomendasikan mulai melakukan upaya *recovery* pariwisata, baik melakukan upaya yang sifatnya *short term* maupun *long term*. Upaya pemerintah terutama pada pemantapan penyusunan rencana *reco-*

very dengan melibatkan unsur adat dan pelaku usaha sehingga terjadi penyamaan persepsi. Selanjutnya pemerintah juga perlu melibatkan Desa Adat dan unsur-unsur kearifan lokal lainnya sebagai motor penggerak sekaligus pengawasan kegiatan wisata di daerahnya masing-masing. Sedangkan bagi para pelaku usaha direkomendasikan untuk melakukan intensifikasi dan modifikasi usaha pariwisata agar sesuai dengan selera wisatawan lokal dan domestik, karena dalam jangka pendek, pariwisata Bali baru akan dibuka bagi pangsa pasar lokal dan domestik. Selanjutnya diperlukan juga kerjasama seluruh *stakeholders* pariwisata dan masyarakat agar dapat membentuk suatu *brand image* alternatif pariwisata Bali yang mengusung konsep *cleanliness, health, and safety*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. M., Nurlaila, Yuda, H. T., & Yulia. (2020). "Pilot study kondisi psikologis relawan bencana covid-19." *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*.
- Agustino, L. 2020. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia." *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253-270. DOI: 10.24258/jba.v16i2.685
- Antara, M. (2012). "Keterkaitan Usaha Kecil Sektor Pariwisata dengan Sektor-Sektor Ekonomi Lainnya di Provinsi Bali: Suatu Pendekatan Model Input-Output." *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 8(1), 1-22.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2020). "Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Maret 2020." *Bali.Bps.Go.Id*, 2019(64), 1-8. <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2020/05/04/717328/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-maret-2020.html>
- Bank Indonesia. (2020). "Laporan Perekonomian Provinsi Bali Mei 2020." *Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/bali/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Bali-Mei-2020.aspx>

- Beach, M. (2010). *Disaster Preparedness and Management*. F. A. Davis Company.
- Bloomberg. 2020. *Mapping the Coronavirus Outbreak Across the World*. <https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-cases-world-map/#travel-restrictions>
- Budiawan, A. (2018). "Analisis Skenario Planning Kebijakan Publik Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 12-25.
- Chen, Y. (2001). *Recent Trends Of Hospitality And Tourism Research Literature On China: A Content Analysis*. 55.
- Chong, K. L. (2020). "The side effects of mass tourism: the voices of Bali islanders." *Asia Pacific Journal of Tourism Research*. <https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1683591>
- Cetin, G. (2020). "Impact of Covid-19 on Tourism Industry." *Journal of Tourismology*, April 2020. DOI: 10.18111/9789284421152
- Dewi, I. K., & Istiadi, Y. (2016). "Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Kampung Naga Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*.
- Fajar, M. (2020). *Estimation of Covid-19 Reproductive Number Case of Indonesia (Estimasi Angka Reproduksi Novel Coronavirus (Covid-19) Kasus Indonesia)*. DOI: 10.13140/RG.2.2.32287.92328
- Giasecke, J. (2002). *Modern Infectious Disease Epidemiology*. Florida: CRC Press.
- Haryanto, T. (2020). "Editorial: Covid-19 Pandemic and International Tourism Demand." *JDE (Journal of Developing Economies)*, 5(1), 1-5.
- Herdiana, D. (2020). "Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung." *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2020.v07.i01.p01>

- Huang, C. L., Wang, Y.M., Li, X.S., ren, L.L., Zhao, J.P. (2020). "Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China." *The Lancet*, 395(10223), 497-506. DOI:[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30183-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5).
- Juaningsih, I.N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., NurIrfan, D. (2020). "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'I*, 7(6), 509-518. DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15363
- Kodhyat, H. (1983). *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kopernik. (2020). *The Impact of Covid-19 on Livelihoods in Bali*. https://v1.kopernik.info/documents/publication/1591847503909_4236.pdf
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Gava Media.
- Ozili, P. & Arun, T. (2020). "Spillover of Covid-19: impact on the Global Economy." *SSRN Electronic Journal*, March 2020. DOI: 10.2139/ssrn.3562570
- Rahman, N. A. A., & Ramli, A. (2014). "Entrepreneurship Management, Competitive Advantage and Firm Performances in the Craft Industry: Concepts and Framework." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.019>
- Sartini, S. (2004). "Menggali kearifan lokal nusantara sebuah kajian filsafati." *Jurnal Filsafat*.
- Schwartz, P. (1991). *The Art of the Long View*. New York: Doubleday Currency.
- Seraphin, H., Gowreesunkar, V.G., & Platania, M. (2019). "New Technologies in the Field of Tourist Guiding: Threat of Tool?" *Journal of Tourismology*, 5(1), 93-112.

- Sugiharyanto, S. W. T. W. (2015). "Persepsi Mahasiswa Pendidikan IPS terhadap Mitigasi Bencana Gempa Bumi." *JIPSINDO*. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v2i1.2887>
- Sukmana, O. (2016). "Proses Pemulihan Pascabencana Berdasarkan Model Permukiman Sosial." *PKS Journal*.
- Sutarya, I. G., & Sirtha, I. N. (2017). "The Modifications of Spiritual Healing in Bali Tourism." *E-Journal of Tourism*. <https://doi.org/10.24922/eot.v4i1.30167>
- UNWTO. (2020). *Report: Travel Restriction 3rd*. World Tourism Organization. <https://www.unwto.org/covid-19-travel-restrictions>
- Wallakula, Y. B. (2020). "Analisis Eksistensi Pariwisata Indonesia di Tengah Situasi Pandemi Corona Virus Disease (Covid19)." *Ilmu Sosial Keagamaan*, 1(1), 47–52.
- Wibowo, H. A. ., Wasino,;, & Setyowati, D. L. (2012). "Kearifan Lokal Dalam Menjaga Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)." *Journal of Educational Social Studies*, 1(1), 25–30.
- Wrihatnolo, R. (2015). *Kebijakan Publik - Bagian III Variabel Penyusunan Kebijakan*. <https://www.slideshare.net/wrihatnolo/005-kebijakan-publikv1publikbagian3variabelpenyusunankebijakan>
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradaya Pratama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada berbagai instansi pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali yang telah memberikan *supporting data* dalam penyusunan kajian ini.

MEMBANGUN KETANGGUHAN EKONOMI ERA PANDEMI

Pandemi Covid-19 telah menjadi bencana kemanusiaan global dan berdampak pada perubahan tatanan kehidupan serta penurunan kinerja ekonomi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan pembatasan pergerakan dan aktivitas masyarakat dijalankan untuk membendung penyebaran Covid-19, dengan konsekuensi aktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun.

Dalam situasi pandemi, pemerintah Indonesia berupaya keras mencari jalan pemulihan aktivitas perekonomian sekaligus menangani masalah kesehatan dan keselamatan masyarakatnya. Secara bertahap, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, kegiatan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia berangsur pulih. Momentum pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 baik dari sisi pengeluaran maupun sektoral, baik di level nasional maupun daerah, memunculkan berbagai gagasan, kajian, dan rekomendasi kebijakan. Tidak hanya soal pemulihan ekonomi, prospek peningkatan daya saing ekonomi Indonesia dan kemudahan berusaha demi mengembalikan proses pembangunan ekonomi nasional ke jalur menuju negara maju juga menjadi bahan kajian para peneliti, akademisi, dan analis.

Gagasan dan pandangan hasil penelitian ilmiah dari berbagai perguruan tinggi, instansi, dan lembaga penelitian di Indonesia mengenai kondisi dan pembenahan perekonomian Indonesia tersebut dipaparkan dalam buku ini. Berbagai kajian dan analisis itu sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan pembaca dan untuk menjadi masukan bagi pemerintah dalam proses perumusan kebijakan pemulihan di bidang ekonomi, keuangan, dan fiskal pascapandemi Covid-19.

Penerbit
Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building
Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29-37
Jakarta 10270

 www.gmu.id  @bukugmu  @bukugmu

